

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya dan taraf kehidupan melalui proses pembelajaran bermutu yang diakui oleh keseluruhan masyarakat. Pendidikan juga adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, sehingga setiap pemerintah di dunia mewajibkan warga negaranya untuk mengikuti pendidikan. Namun tidak semua penduduk di Indonesia mampu menyekolahkan anak mereka hingga 9 (sembilan) tahun. Kondisi ini dipicu juga dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang diikuti nilai tukar rupiah US dolar menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan yang bertolak dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang “sistim pendidikan nasional”.

Permasalahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin terhadap wajib pendidikan 9 (sembilan) tahun. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan permasalahan publik di atas maka pemerintah Indonesia berupaya menyalurkan bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dalam bentuk kebijakan program dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini merupakan dana bantuan pemerintah dibidang pendidikan yang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya program wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Berkaitan dengan ini, secara khusus seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar negeri maupun swasta bebas dari beban biaya operasional sekolah. Sehingga sejalan dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.” Karena Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa, untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan.
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari langkah-langkah kebijakan di atas yang diambil pemerintah untuk mewujudkan visi pendidikan nasional maka, pemerintah pun merealisasikan kebijakan tersebut dalam bentuk program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disetiap sekolah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Karena Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sehingga wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sebagaimana berdasarkan bunyi pasal 47 ayat (1) dan (2) mengenai sumber pendanaan pendidikan, yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecakupan,

dan keberlanjutan. Serta pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu sejalan dengan aturan dan ketentuan di atas maka, Program Dana BOS yang direkomendasikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana penyaluran, penggunaan, dan pertanggung-jawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh para pihak yang terkait dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, hingga setiap sekolah-sekolah, yang memenuhi kriteria dan berhak menerima dana BOS. Penyaluran dana BOS ini pun dilakukan per triwulan semenjak tahun 2005, hingga saat ini.

Tujuan diluncurkannya Dana BOS adalah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa lain yang tidak mampu agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar atau pendidikan 9 (sembilan) tahun. Target dari bantuan dana (BOS) ini adalah agar pendidikan bisa diikuti oleh sebagian besar atau minimal 95% dari semua anak usia 7-15 tahun. Di sisi lain salah satu indikator keberhasilan program BOS yaitu penuntasan program wajib belajar 9 tahun, serta dapat meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Sekolah Dasar Inpres Tala merupakan salah satu sekolah yang memenuhi syarat atau kriteria, dan termasuk penerima dana BOS yang dialokasikan pemerintah. Penulis berniat untuk menelusuri lebih lanjut terkait dengan dampak dari dana BOS yang diterima, baik yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya, termasuk dampak BOS

terhadap unit-unit lainnya. Lebih lanjut, penulis meneliti terkait dampak dana BOS yang diterima dan dilaksanakan oleh SDI Tala pada tahun 2017 dengan jumlah dananya senilai Rp. 216.800.000 dari jumlah murid 271 orang, dengan rincian yang diterima per murid senilai 800.000 di tahun 2017. Berdasarkan data di atas, maka dapat dijabarkan secara singkat dalam tabel berikut ini:

Tabel: 1.1 Penerima Dana BOS di SDI Tala Tahun 2017

Kelas	Siswa/Murid	Jumlah Uang Yang Diterima
I	50 Orang	Rp 40.000.000
II	42 Orang	Rp 33.600.000
III	44 Orang	Rp 35.200.000
IV	43Orang	Rp 34.400.000
V	45 Orang	Rp 36.000.000
VI	47 Orang	Rp 37.600.000
TOTAL	271 Orang	Rp 216.800.000

Sumber: Sekolah Dasar Inpres Tala tahun 2017

Berangkat dari data awal yang dicantumkan penulis, terkait dengan anggaran dana BOS yang diterima oleh SD Inpres Tala pada tahun 2017, penulis ingin melihat lebih lanjut bagaimana perubahan atau dampak BOS

yang timbul baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun unit-unit lain (intansi/ sekolah, serta para murid SD Inpres Tala). Maka dari itu dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas penulis pun tertarik untuk meneliti mengenai: **“Evaluasi Dampak Program Dana Bantuan Oprasional Sekolah (Dana BOS) di Sekolah Dasar Inpres Tala, Kabupaten Belu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari rumusan latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Apa saja dimensi/ aspek sosial yang terkena dampak dari program dana BOS?
2. Apa saja unit-unit sosial yang terkena dampak dari dana BOS dan bagaimana penilaian mereka terhadap program dana BOS?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek-aspek yang terkena dampak dari program Dana BOS.
2. Untuk mengetahui unit-unit sosial, yang terkena dampak dari dana BOS dan penilaian mereka terhadap program dana BOS

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis Yaitu:
 - a. Dapat memberikan gambaran mengenai dampak dari program dana BOS.

- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang terkait dampak program dana BOS.

2. Manfaat Teoritis Yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di program studi Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai studi evaluasi dampak suatu program.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti lain yang ingin mendalami penelitian bertema serupa.